



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERINALDI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 196764

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.234.000.000
1. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000		
2. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000		
3. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	384.000.000
1. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI XL-7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 211.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	71.990.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.773.590.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.773.590.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.